

AUDIT USAHA KECIL

IRENE INDRIASARI, ABDUL KADIR, ABDUL FATAH HASANUDDIN

Universitas Diponegoro

LATAR BELAKANG

Usaha kecil sebagai bagian dari sistem perekonomian suatu negara mempunyai peranan yang sangat strategis, terutama dalam menghadapi situasi krisis ekonomi seperti sekarang ini. Oleh karena itu usaha kecil perlu mendapat perhatian, baik oleh pemerintah maupun profesi akuntansi.

Profesi akuntansi dapat berperan baik sebagai pihak internal maupun eksternal perusahaan. Sebagai pihak eksternal, profesi akuntansi akan berperan sebagai auditor independen yang akan memberikan pendapat atas temuan-temuannya. Pengauditan usaha kecil merupakan tantangan bagi para praktisi, terutama yang berkaitan dengan penerapan standar independensi serta penelitian dan pengevaluasian internal kontrol.

Schaps (1984), menjelaskan bahwa setelah sekian lama tidak diperhatikan, pengauditan terhadap usaha kecil mulai menarik perhatian para profesional serta badan penyusun standar profesi. *Auditing Standards Board* (ASB) mengeluarkan SAS 43, *Omnibus Statement on Auditing Standards*, yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang sering muncul dalam masalah pengauditan usaha kecil serta mendorong CPA agar mengevaluasi keefektifan dan keefisienan cara pengauditan mereka.

Audit usaha kecil memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan audit pada umumnya. Standar Auditing Seksi 710 yang dikeluarkan oleh IAI tentang Pertimbangan Khusus Dalam Audit Usaha Kecil paragraf 02 menyebutkan dua karakteristik usaha kecil antara lain: (a) Pemisahan tugas yang terbatas; atau (b) Dominasi oleh manajer senior atau pemilik terhadap semua aspek pokok bisnis. Maltzman (1985) Hennesy (1984a), dan CICA (1988) mengkategorikan usaha kecil dalam *primary characteristic* dan *secondary characteristic*. *Primary characteristic* meliputi konsentrasi kepemilikan, tidak adanya pemisahan tugas yang jelas, operasinya sederhana, tidak memiliki dokumentasi yang formal. *Secondary characteristic* meliputi keterbatasan pengetahuan pekerja mengenai akuntansi, otoritas manajemen terpusat, pengambil kebijakan tidak aktif dan efektif.

Berdasarkan karakteristik yang telah dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa audit perusahaan kecil akan mengalami beberapa kendala/permasalahan sehubungan dengan lemahnya internal kontrol yang merupakan pijakan awal dalam mengaudit suatu perusahaan. Oleh karena itu dalam makalah ini akan dikemukakan beberapa permasalahan audit perusahaan kecil dan bagaimana auditor menyikapi masalah tersebut.

PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah:

1. Apakah audit usaha kecil sama dengan audit perusahaan besar?
2. Bagaimanakah independensi auditor dalam audit usaha kecil?
3. Bagaimana evaluasi internal kontrol usaha kecil?

PEMBAHASAN

Berdasarkan survey yang dilakukan di Inggris pada tahun 1985, dilaporkan bahwa masalah dominan yang dihadapi oleh usaha kecil adalah komersial (termasuk arus kas), dan masalah-masalah pribadi, di mana akuntansi dan tata buku dikategorikan sebagai masalah kecil. Sebaliknya, masalah yang paling sulit dalam usaha kecil adalah masalah keuangan, baik masalah arus kas seperti mendapatkan *finance* (dana) dari bank atau membujuk debitor untuk membayar (Carsberg dkk, 1985). Pandangan ini berlawanan dengan penekanan usaha pribadi pada masalah komersial sebagai yang paling sulit. Auditor menempatkan masalah ini sebagai masalah yang sulit urutan kedua dan masalah akuntansi sebagai urutan ketiga diikuti dengan masalah-masalah lainnya seperti resesi ekonomi, masalah pribadi dan masalah supply.

1. Definisi dan Karakteristik Usaha Kecil

Ada 2 pendekatan yang bisa digunakan untuk menentukan definisi usaha kecil yaitu kualitatif dan kuantitatif (Carsberg dkk, 1985). Dengan menggunakan :

- a. Pendekatan kualitatif: definisi usaha kecil dapat didasarkan pada sifat dasar proprietorial/kepemilikan, kurangnya internal control, gaya manajemen pribadi, dan ketergantungan kepada akuntan profesional.
- b. Pendekatan kuantitatif: Di Inggris, definisi usaha kecil tertuang di dalam S 8 Companies Act 1981 dengan 3 kriteria yaitu :
 - a) Turnovernya tidak lebih dari £ 1.400.000
 - b) Total aset (total neraca) tidak lebih dari £ 700.000
 - c) Jumlah karyawan tidak melebihi 50 orang.

Sedangkan karakteristik usaha kecil dapat dibagi menjadi:

1. Karakteristik Primer

a. Konsentrasi Kepemilikan

Dalam usaha kecil keputusan biasanya dibuat oleh pemilik sebagai manajer (CICA, 1988). Bhaskar dan Wil-

liams (1986) berpendapat bahwa "keterlibatan pemilik/manajer mungkin merupakan konsep yang paling penting dalam internal kontrol usaha kecil."

"Karena pemilik/manajer sangat berkaitan erat dengan usaha, kebutuhan akan sistem pelaporan formal untuk memonitor usaha tidak selalu penting" (CICA, 1988).

b. Pemisahan yang Terbatas

Pemisahan yang terbatas dari tugas-tugas fungsi yang bertentangan. Umumnya pada usaha kecil seorang karyawan mempunyai tanggung jawab untuk operasi klerikal sehari-hari seperti akuntansi dan juga untuk pemeliharaan aset (CICA, 1988; CICA, 1975). Ini menciptakan resiko tinggi untuk manipulasi. Namun perlu dicatat bahwa pemisahan tersebut tergantung dari kompleksitas selain juga frekuensi operasi usaha.

c. Potensi Kelalaian Manajemen Internal Kontrol Tinggi

Hal ini sebagai dampak konsentrasi kepemilikan (Hennesy, 1984a; Maltzman, 1985; CICA, 1988). Karena konsentrasi otoritas, pemilik dan juga manajer dapat dengan mudah mengabaikan prosedur yang telah dirumuskan (CICA, 1988) yang disadari sebagai keterbatasan lingkungan usaha kecil. Dapat dikatakan bahwa kelalaian manajemen akan internal kontrol adalah masalah integritas manajemen.

2. Karakteristik Sekunder

a. Karyawan memiliki pengetahuan akuntansi yang terbatas.

Hal tersebut ditunjukkan dengan sistem pencatatan informal dan dokumentasi transaksi yang tidak memadai (Hennesy, 1984a).

b. Tidak terdapat Badan pembuat kebijakan.

Jikalau ada badan ini, dominasi pemilik/manajer menyebabkan badan ini menjadi tidak aktif atau tidak efektif.

Berdasarkan penelitian *D. D. Raiborn* dari *Bradley University*, usaha kecil adalah usaha yang memiliki kombinasi ciri-ciri sebagai berikut:

a. Kepemilikan dan kontrol operasionalnya terkonsentrasi pada satu atau sedikit individu.

b. Personel manajemennya memiliki kemampuan akuntansi yang terbatas.

- c. Pengelompokan fungsi-fungsi operasional dan sistem akuntansinya dirasakan terbatas karena jumlah karyawan sedikit.
- d. Badan pembuat keputusannya tidak aktif atau tidak efisien.

Di Indonesia, usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil. Kriteria usaha kecil sebagaimana tercantum dalam UU tersebut adalah:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau,
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Milik Warga Negara Indonesia.
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

2. Audit Usaha Kecil

a. Kebutuhan Audit Untuk Usaha Kecil

Masalah yang mendasar dalam pengauditan usaha kecil, yaitu apakah perusahaan kecil harus diaudit (Page, 1985). Di Inggris, menurut Companies Acts 1981, perusahaan kecil wajib diaudit, ini berbeda dengan di Amerika Serikat di mana tidak diwajibkan bagi usaha kecil untuk diaudit. Dari kontroversi perlu tidaknya dilakukan audit terhadap usaha kecil, Departemen Perdagangan Inggris mengeluarkan Green Paper "Akuntansi Perusahaan dan Pengungkapan Dokumen Konsultatif" yang mendiskusikan 3 kemungkinan alternatif bagi permasalahan audit usaha kecil:

1. Usaha kecil harus terus diaudit
2. Selain audit, dapat dilakukan tingkat yang lebih rendah dari attestasi yang disebut *review*.
3. Usaha kecil tidak perlu diaudit.

Argumen yang menyetujui penghapusan keharusan audit bagi perusahaan kecil diringkas, sebagai berikut:

1. Pemilik perusahaan tersebut cenderung meminta jasa finansial (tata buku, konsultasi pajak, dll) dari akuntan

- profesional dan memandang aspek audit dari pekerjaan tersebut sebagai bagian dari nilai perusahaan jangka panjang.
2. Karena pemegang saham dan direktornya adalah orang yang sama, maka merupakan suatu hal yang lucu jika "direktur" memberikan informasi pada auditor dimana direktur tersebut kemudian berada pada posisi melaporkan kembali pada diri mereka sendiri yang "berperan" sebagai pemegang saham.
 3. Tidak ada kewajiban hukum bagi kepentingan luar yang harus dilayani oleh auditor dan dalam beberapa kasus pihak luar tersebut tidak memberikan sumbangan pada fee audit.
 4. Kebanyakan kepentingan luar seperti bank diproteksi dengan baik oleh jaminan pribadi dari direktur dan dibebankan pada aset perusahaan, karenanya kepentingan tersebut tidak tergantung pada audit untuk proteksi.
 5. Kreditor tidak banyak menggunakan audit karena akun-akun dan laporan audit diarsipkan beberapa bulan setelah kredit diberikan dan akun tersebut, meskipun sangat dipahami hanya akan memberikan sedikit petunjuk tentang risiko yang akan terkandung di dalamnya.

Sedangkan argumentasi dari yang tetap mempertahankan audit di pihak lainnya dapat diringkas, sebagai berikut :

1. Kepentingan luar pada kenyataannya benar-benar membangun untuk berhubungan dengan perusahaan yang kewajibannya terbatas, dimana pemegang saham atau direktur dapat memilih sendiri waktu mereka untuk melikuidasi perusahaan pada biaya yang rendah atau mengalami kerugian tertentu dari kreditor yang tidak terpotensi. Kemungkinan tindakan tersebut mewakili hak paling istimewa dari perusahaan dan karenanya audit merupakan pengamanan yang sangat vital dari adanya penyalahgunaan tersebut.
2. Meskipun hukum gagal untuk mengakui kewajiban yang memperhatikan pihak luar pada bagian auditor, kewajiban itu dapat tersirat dari kewajiban dalam Companies Act 1985 bahwa semua perusahaan diharuskan untuk mempublikasikan akun-akun mereka yang telah diaudit, bersama-sama dengan pendapatan tahunan mereka, yaitu dengan mempersiapkannya dalam Companies House. Karenanya terdapat implikasi yang jelas bahwa pihak luar dapat bergantung pada akun-akun yang telah diarsipkan untuk tujuan tertentu.
3. Meskipun argumen yang menyangkut tentang pengarsipan tersebut dihargai, kurangnya tepat untuk menyamakan nilai audit secara keseluruhan dengan nilai laporan audit - sering

dianggap sebagai formalitas dan kepentingan akademik. Keberadaan auditlah yang menunjukkan disiplin ilmu utama dalam praktek perusahaan dan yang merupakan salah satu perlindungan yang paling signifikan dari kepentingan-kepentingan semua pihak yang melakukan usaha dengan entitas perusahaan. Karenanya penyelewengan dan kesalahan manajemen pada tingkat yang tidak dapat diukur cenderung terjadi dengan adanya penghapusan total dari disiplin audit.

4. Pemegang saham minoritas yang tidak mempunyai kontak eksekutif dengan perusahaan biasanya rentan terhadap konsekuensi pelanggaran kewajiban penggadaian dari direktur (fiduciary), seperti transaksi yang "terkait" dimana direktur mendapatkan keuntungan pribadi. Pemegang saham seperti itu cenderung tergantung pada auditor, untuk mengungkap masalah tersebut pada mereka sehingga tindakan yang tepat dapat diambil.

Setelah dilakukan jajak pendapat, maka didapatkan suara mayoritas mempertahankan audit perlu diterapkan dalam usaha kecil. Akhirnya direkomendasikan oleh English Institute dalam memo mereka terhadap Departemen Perdagangan (ICAEW 1980) : *Audit untuk usaha kecil harus tetap dilakukan, dengan dasar bahwa mayoritas pengguna akun tidak menginginkan perubahan.* ICAEW menolak review sebagai alternatif karena adanya bahaya kebingungan/kerancuan dengan audit dan karena review juga tidak begitu banyak berbeda dalam biaya dengan audit.

Di Indonesia, terdapat pedoman dasar untuk melakukan audit terhadap usaha kecil. Hal ini tertuang dalam Standar Auditing Seksi 710 tentang pertimbangan khusus dalam audit usaha kecil. *"Pernyataan Standar Auditing yang diterbitkan oleh IAI diterapkan dalam audit informasi keuangan satuan usaha apapun tanpa memperhatikan ukuran usahanya. Usaha kecil memiliki suatu kombinasi karakteristik yang menyebabkan auditor perlu menyesuaikan pendekatan auditnya dengan keadaan yang melingkupi penugasan audit usaha kecil".*

b. Kebutuhan Standar Audit Usaha Kecil

Banyaknya usaha kecil yang dilikuidasi tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa kebanyakan usaha kecil biasanya mempunyai kelemahan dalam internal control mereka (CICA, 1988; Hennesy, 1984; Maltzman, 1985) Kelemahan ini mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik seperti konsentrasi kepemilikan, pemisahan yang terbatas, kelalaian manajemen, pengetahuan akuntansi yang terbatas, badan pembuat kebijakan yang tidak aktif dan tidak efektif, dan akses yang mudah pada aset perusahaan.

Dalam kondisi-kondisi tersebut-lah audit finansial harus dibedakan antara usaha kecil dan perusahaan besar. Namun, GAAS yang diterapkan kepada semua kinerja audit tidak memandang sifat dasar dan ukuran entitas yang diaudit (CICA, 1988). Standar auditing cenderung bias pada perusahaan besar. Karenanya pembebanan standar universal, yang tampaknya didasarkan pada promisi bahwa usaha kecil hanyalah versi kecil dari perusahaan besar (hanya masalah ukuran) tidaklah benar (Keasy, dkk, 1988). Berdasarkan keadaan tersebut, "suatu audit yang dilaksanakan sesuai dengan praktek yang berlaku umum adalah praktek yang mahal" dibandingkan keuntungan yang dapat diraih. (Hennesy, 1984).

Permasalahannya, apakah prosedur audit perusahaan besar sama dengan prosedur audit usaha kecil? Jika standar yang sama diterapkan baik pada perusahaan kecil maupun besar, maka usaha kecil menanggung biaya yang lebih besar secara relatif dibandingkan perusahaan besar. Menurut Schaps (1984) kerangka proses pengauditan dapat diterapkan untuk segala jenis dan besarnya usaha. Perbedaan penting dari sistem pendekatan tradisional adalah pada tahap perencanaan perjanjian. Perencanaan pengauditan lebih ditekankan dan memiliki peranan penting karena mempengaruhi keputusan tentang cara pengauditan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan perjanjian adalah:

1. Mempelajari perusahaan klien.
2. Mengidentifikasi rekening-rekening keuangan penting.
3. Membuat penilaian pendahuluan terhadap lingkup kontrol umum.
4. Menentukan pendekatan pengauditan.
5. Memilih dan melaksanakan prosedur pengauditan akhir tahun.

Menurut Page (1984), pengauditan usaha kecil harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperlakukan audit usaha kecil sama dengan perusahaan besar memungkinkan auditor untuk memandang sifat dasar audit secara murni. Selanjutnya dijelaskan bahwa usaha kecil harus diaudit sama dengan perusahaan besar bukanlah berarti bahwa prosedur auditnya identik. Karena adanya bukti yang tidak memadai dari pengendalian operasi usaha kecil dan karena adanya bahaya kelalaian manajemen, auditor cenderung untuk tidak bergantung pada pengendalian dan lebih banyak melakukan tes substantif, namun tes semacam ini juga digunakan di dalam audit perusahaan besar.
2. Strategi kedua adalah menerapkan standar yang lebih rendah untuk bukti-bukti pendukung opininya. Misalnya dengan menggunakan batas tingkat keyakinan yang lebih besar. Au-

ditor dapat melakukan justifikasi ini dengan memandang sifat dasar konsep "benar dan wajar" dan konsep materialitas. Konsep benar dan wajar harus dibatasi dengan pertimbangan biaya dan keuntungan, yang akan membuat auditor membatasi luas auditnya dan menyederhanakan prosedur auditing. Sedangkan sesuatu dianggap material apabila cukup besar untuk membuat perubahan. Dalam menganalisis potensi materialitas suatu item dalam akun perusahaan kecil, auditor dapat melihat kemungkinan penggunaan akun tersebut dan menentukan seberapa besar dia percaya suatu kesalahan dalam akun tersebut akan membuat suatu perbedaan bagi pengguna laporan keuangan. Pertimbangan tersebut memberikan auditor alasan yang baik untuk menambah persentasi kesalahan yang siap diterimanya akan laporan keuangan yang direview olehnya. Risiko audit dan materialitas usaha kecil dapat dianalisis dengan mempertimbangkan sifat dasar usaha dan industri, keuangan, dan arus kas transaksi (Hennesy, 1984a). Nast (1986) menentukan bahwa risiko audit dan materialitas dengan mengidentifikasi akun-akun yang material dan kelas-kelas transaksi yang mempunyai risiko kesalahan tinggi.

3. Pilihan lain adalah mengkualifikasikan laporan audit dari auditor.

Pada awalnya pengkualifikasian laporan audit tampaknya bukan merupakan prosedur yang menarik untuk diterapkan. Karena Companies Acts mengharuskan auditor untuk membentuk suatu opini, sehingga ada bias profesional dalam penggunaan kualifikasi laporan audit adalah untuk mempertahankan efektivitas secara ekonomis, dan klien diharapkan untuk dapat menerima hal ini. Studi empiris dari Keasy (1988) menemukan bahwa kebanyakan KAP besar cenderung memberikan opini qualified dalam pengauditan usaha kecil.

Menurut Woolf (1986) standar auditing 1980 (Inggeris) dapat diterapkan di perusahaan kecil, namun perlu diperhatikan poin-poin berikut yang diadaptasi dari publikasi True and Fair APC:

1. Perencanaan, pengendalian, dan pencatatan
Perencanaan mungkin tidak perlu menjadi tugas yang berat dalam usaha kecil namun perencanaan tetap perlu. Pengendalian atas pekerjaan yang didelegasikan pada staf juga penting dalam kasus usaha kecil seperti dalam perusahaan besar. Demikian pula dengan kepentingan untuk mencatat pekerjaan audit yang telah dilakukan serta bukti yang didapatkan juga diperlukan.

Dalam kondisi-kondisi tersebut-lah audit finansial harus dibedakan antara usaha kecil dan perusahaan besar. Namun, GAAS yang diterapkan kepada semua kinerja audit tidak memandang sifat dasar dan ukuran entitas yang diaudit (CICA, 1988). Standar auditing cenderung bias pada perusahaan besar. Karenanya pembebanan standar universal, yang tampaknya didasarkan pada promisi bahwa usaha kecil hanyalah versi kecil dari perusahaan besar (hanya masalah ukuran) tidaklah benar (Keasy, dkk, 1988). Berdasarkan keadaan tersebut, "suatu audit yang dilaksanakan sesuai dengan praktek yang berlaku umum adalah praktek yang mahal" dibandingkan keuntungan yang dapat diraih. (Hennesy, 1984).

Permasalahannya, apakah prosedur audit perusahaan besar sama dengan prosedur audit usaha kecil? Jika standar yang sama diterapkan baik pada perusahaan kecil maupun besar, maka usaha kecil menanggung biaya yang lebih besar secara relatif dibandingkan perusahaan besar. Menurut Schaps (1984) kerangka proses pengauditan dapat diterapkan untuk segala jenis dan besarnya usaha. Perbedaan penting dari sistem pendekatan tradisional adalah pada tahap perencanaan perjanjian. Perencanaan pengauditan lebih ditekankan dan memiliki peranan penting karena mempengaruhi keputusan tentang cara pengauditan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan perjanjian adalah:

1. Mempelajari perusahaan klien.
2. Mengidentifikasi rekening-rekening keuangan penting.
3. Membuat penilaian pendahuluan terhadap lingkup kontrol umum.
4. Menentukan pendekatan pengauditan.
5. Memilih dan melaksanakan prosedur pengauditan akhir tahun.

Menurut Page (1984), pengauditan usaha kecil harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperlakukan audit usaha kecil sama dengan perusahaan besar memungkinkan auditor untuk memandang sifat dasar audit secara murni. Selanjutnya dijelaskan bahwa usaha kecil harus diaudit sama dengan perusahaan besar bukanlah berarti bahwa prosedur auditnya identik. Karena adanya bukti yang tidak memadai dari pengendalian operasi usaha kecil dan karena adanya bahaya kelalaian manajemen, auditor cenderung untuk tidak bergantung pada pengendalian dan lebih banyak melakukan tes substantif, namun tes semacam ini juga digunakan di dalam audit perusahaan besar.
2. Strategi kedua adalah menerapkan standar yang lebih rendah untuk bukti-bukti pendukung opininya. Misalnya dengan menggunakan batas tingkat keyakinan yang lebih besar. Au-

ditor dapat melakukan justifikasi ini dengan memandang sifat dasar konsep "benar dan wajar" dan konsep materialitas. Konsep benar dan wajar harus dibatasi dengan pertimbangan biaya dan keuntungan, yang akan membuat auditor membatasi luas auditnya dan menyederhanakan prosedur auditing. Sedangkan sesuatu dianggap material apabila cukup besar untuk membuat perubahan. Dalam menganalisis potensi materialitas suatu item dalam akun perusahaan kecil, auditor dapat melihat kemungkinan penggunaan akun tersebut dan menentukan seberapa besar dia percaya suatu kesalahan dalam akun tersebut akan membuat suatu perbedaan bagi pengguna laporan keuangan. Pertimbangan tersebut memberikan auditor alasan yang baik untuk menambah persentasi kesalahan yang siap diterimanya akan laporan keuangan yang direview olehnya. Risiko audit dan materialitas usaha kecil dapat dianalisis dengan mempertimbangkan sifat dasar usaha dan industri, keuangan, dan arus kas transaksi (Hennesy, 1984a). Nast (1986) menentukan bahwa risiko audit dan materialitas dengan mengidentifikasi akun-akun yang material dan kelas-kelas transaksi yang mempunyai risiko kesalahan tinggi.

3. Pilihan lain adalah mengkualifikasikan laporan audit dari auditor.

Pada awalnya pengkualifikasian laporan audit tampaknya bukan merupakan prosedur yang menarik untuk diterapkan. Karena Companies Acts mengharuskan auditor untuk membentuk suatu opini, sehingga ada bias profesional dalam penggunaan kualifikasi laporan audit adalah untuk mempertahankan efektivitas secara ekonomis, dan klien diharapkan untuk dapat menerima hal ini. Studi empiris dari Keasy (1988) menemukan bahwa kebanyakan KAP besar cenderung memberikan opini qualified dalam pengauditan usaha kecil.

Menurut Woolf (1986) standar auditing 1980 (Inggeris) dapat diterapkan di perusahaan kecil, namun perlu diperhatikan poin-poin berikut yang diadaptasi dari publikasi True and Fair APC:

1. Perencanaan, pengendalian, dan pencatatan
Perencanaan mungkin tidak perlu menjadi tugas yang berat dalam usaha kecil namun perencanaan tetap perlu. Pengendalian atas pekerjaan yang didelegasikan pada staf juga penting dalam kasus usaha kecil seperti dalam perusahaan besar. Demikian pula dengan kepentingan untuk mencatat pekerjaan audit yang telah dilakukan serta bukti yang didapatkan juga diperlukan.

2. **Sistem akuntansi**
Kebutuhan untuk mempertimbangkan sistem akuntansi klien juga perlu di perusahaan kecil. Jika tidak terdapat sistem yang terorganisir dalam pengumpulan data akuntansi dasar (detail pembelian, penjualan, penerimaan, pengeluaran kas, dll), maka auditing tidak akan memadai untuk meyakinkan bahwa akun-akun benar dan wajar.
3. **Bukti audit**
Pengumpulan bukti audit yang cukup tentunya merupakan inti auditing. Bukti seperti itu mungkin sulit dalam kasus usaha kecil dan mungkin bentuknya lain dibandingkan bukti di perusahaan besar, namun apabila tidak terdapat bukti audit yang memadai tidak akan dicapai laporan audit yang unqualified.
4. **Internal kontrol**
Format standar dan pedoman auditing memperjelas bahwa auditor tidak begitu perlu terlalu bergantung pada sistem internal kontrol. Dalam kasus usaha kecil, kebutuhan akan internal kontrol dapat dipenuhi oleh pemilik sendiri: untuk alasan itulah auditor mungkin hanya menemukan sedikit bukti bahwa kontrol tersebut telah dilaksanakan dengan benar. Bukti yang sangat diperlukan bagi auditor adalah adanya internal kontrol yang benar-benar diterapkan.
5. **Review laporan keuangan**
Kebutuhan untuk mereview laporan keuangan juga diperlukan dalam kasus semua ukuran usaha. Contohnya pemeriksaan rasio seperti gross profit terhadap penjualan. Akun-akun dari perusahaan kecil harus mematuhi kewajiban hukum dan standar akuntansi seperti perusahaan besar dan laporan keuangan perlu direview oleh auditor untuk menguji tingkat kepatuhan. Dalam beberapa kasus dimungkinkan untuk mencapai opini unqualified atas laporan keuangan dengan menggabungkan bukti-bukti yang diperoleh dari pengujian substantif yang diperluas dengan review yang baik atas biaya dan margin. Namun demikian tujuan yang harus selalu dicapai adalah bukti yang cukup untuk mendukung opini unqualified.

c. **Independensi Auditor dalam Audit Usaha Kecil**

Standar independensi sulit untuk diterapkan dalam pengauditan usaha kecil karena adanya keterlibatan yang mendalam antara pihak auditor dengan kliennya (Bryan dan Rouse, 1984). AICPA mengatur tentang independensi tersebut dalam Code of Professional Ethics. Ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk menjamin independensi tersebut, yaitu :

1. KAP tidak boleh memiliki hubungan dengan klien karena akan mempengaruhi independensi.
2. Klien harus bertanggungjawab terhadap laporan keuangannya.
3. KAP tidak boleh mengasumsikan peranan karyawan atau manajemen.
4. Pemeriksaan KAP harus sesuai dengan standar pengauditan yang berterima umum.

Observasi tentang penerapan interpretasi di atas akan membantu menilai peranan independensi auditor dalam hal:

1. Mempersiapkan laporan kerja
Berdasarkan undang-undang SEC, mengadakan jasa akuntansi merupakan pelanggaran independensi. Ketentuan ini tidak berpengaruh dalam usaha kecil karena sekuritas mereka tidak terdaftar dalam SEC.
2. Peran sebagai konsultan
Dokumentasi tentang peranan sebagai konsultan atau penasihat beserta pengaruhnya terhadap independensi harus tercantum di dalam kertas kerja.
3. Mempersiapkan laporan keuangan
Persiapan ini perlu dilakukan karena pihak klien tidak memiliki sistem akuntansi yang memadai serta tidak memahami dan memenuhi ketentuan-ketentuan GAAP.
4. Melaksanakan fungsi-fungsi manajerial
Karena keterlibatan penuh pihak auditor dalam proses pengauditan, maka mereka perlu menghindari prosedur-prosedur tertentu yang dapat dianggap sebagai peranan manajemen.

d. Evaluasi Internal Kontrol

Bryan dan Rouse (1984) menjelaskan bahwa usaha kecil hanya memiliki kontrol internal yang terbatas tidak seperti pada perusahaan-perusahaan besar. Keterbatasan ini adalah akibat dari 3 hal: terbatasnya pengelompokan-pengelompokan fungsi kerja, pengaruh hubungan personel yang erat, dan kurangnya pengetahuan manajer/pemilik tentang prosedur kontrol yang memadai.

Keterbatasan usaha kecil yang tercermin dalam karakteristiknya mempunyai dampak dalam pelaksanaan audit usaha kecil. Maka, auditor harus memberikan sedikit perhatian atau tidak memperhatikan sama sekali internal control. (Nash, 1986; CICA, 1988; Hennesy, 1984a). Konsekuensi yang lebih lanjut dari strategi ini adalah tes compliance/kepatuhan sedikit atau tidak diperhatikan sama sekali. Hal ini akan dijelaskan dalam gambar berikut:

Kegiatan-kegiatan dalam Audit Perusahaan:

KEGIATAN PERJANJIAN AWAL
AKTIVITAS UNTUK MEMBANGUN PENGETAHUAN AUDIT KUMULATIF
KEGIATAN PENGUJIAN COMPLIANCE KEGIATAN PENGUJIAN SUBSTANTIF
AKTIVITAS REVIEW ANALITIS
PEMBENTUKAN OPINI DAN AKTIVITAS PELAPORAN
AKTIVITAS YANG BERKELANJUTAN

Internal kontrol
yang lemah

Situasi yang
berbeda

Internal kontrol
yang formal

Sumber : Jones, M.E. , *Auditing: A subject with ever widening horizons*, 1984.

Ketergantungan yang tidak besar pada internal control memaksa auditor untuk sangat bergantung pada uji substantif yang termasuk di dalamnya adalah review, vouching dan konfirmasi (Nast, 1986; Hennesy, 1984a; Hennesy, 1984b; CICA, 1988). Dampak dari keputusan ini adalah aplikasi sampling yang terbatas. Selain itu, populasi data dalam usaha kecil juga kecil. Hennesy (1984b) menyarankan 2 cara alternatif untuk sampling yaitu dengan melakukan pengujian item-item yang biasa diuji tanpa penerapan prosedur terhadap sisa dari populasi dan atau prosedur diterapkan 100% dari strata transaksi tertentu atau neraca.

Menurut CICA (1988), situasi yang membuat usaha kecil tidak dapat diaudit adalah catatan akuntansi yang tidak memadai, yang mencatat transaksi-transaksi yang tidak didukung oleh dokumen sumber dan/atau dokumen sumbernya tidak dicatat, pengendalian tidak ada dan ada pengabaian dasar untuk praktek-praktek usaha yang baik, integritas manajemen dipertanyakan.

Kurangnya internal control yang formal dalam usaha kecil bagaimanapun tidak berarti bahwa tidak ada rancangan prosedur yang dapat memeberikan keyakinan audit atas asersi yang lengkap. Banyak prosedur yang dapat diterapkan seperti konfirmasi, transaksi dapat diuji berdasarkan alasan bahwa "bahkan usaha yang sangat kecilpun dapat menggunakan sistem *double entry* akuntansi yang meliputi beberapa pengendalian" dan review seperti prosedur review analitis dan observasi (CICA, 1988)

SAS 43 menjelaskan tingkat minimum penelitian dan evaluasi kontrol akuntansi internal bila memang hasilnya tidak begitu diperlukan. Ketentuannya yaitu peninjauan atau kontrol akuntansi internal terbatas hanya untuk memahami lingkup kontrol dan arus transaksi serta untuk mendokumentasikan dasar-dasar keputusan auditor yang menyatakan untuk tidak bergantung pada kontrol internal.

Penelitian dan uji terhadap kontrol internal tidak akan banyak berpengaruh bila sistem kontrolnya tidak memerlukan pengelompokan-pengelompokan tugas. Ide dasarnya adalah dalam usaha kecil yang sumber dayanya terbatas, biaya yang dikeluarkan akan melebihi keuntungan yang diperoleh. Secara umum dalam proses pengauditan usaha kecil tidak diperlukan uji kelayakan terhadap kontrol, karena : (1) kurangnya pengelompokan-pengelompokan tugas; (2) kurangnya dokumentasi kontrol akuntansi internal oleh klien; (3) pertimbangan biaya pengujian; (4) kurangnya panduan tentang batasan-batasan prosedur substantif.

Arens dan Loebbecke (1997) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai dampak yang signifikan kepada sifat struktur pengendalian intern dan pengendalian spesifik. Kenyataannya, lebih sukar untuk menyusun pemisahan tugas yang memadai dalam perusahaan kecil.

Selanjutnya dijelaskan bahwa pengendalian utama yang tersedia dalam perusahaan kecil adalah pengetahuan dan perhatian pimpinan puncak operasi, yang sering kali manajer pemilik. Kepentingan pribadi dalam organisasi dan hubungan yang dekat dengan pegawai memungkinkan dilakukannya evaluasi yang hati-hati terhadap kompetensi pegawai dan efektifitas keseluruhan sistem.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di muka, maka dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Usaha kecil mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan perusahaan besar. Karena itu audit usaha kecil mulai menarik perhatian para profesional serta badan penyusun standar profesi. SAS 43 dikeluarkan untuk menjawab permasalahan yang sering muncul dalam pengauditan usaha kecil.
2. Usaha kecil mempunyai masalah yang tidak dihadapi oleh perusahaan besar, yaitu: internal kontrol yang lemah, yang terkait dengan karakteristiknya. Kondisi ini mempunyai dampak terhadap auditabilitas usaha kecil.

3. Dalam mengaudit usaha kecil, auditor merasa kurang tepat untuk bergantung pada internal kontrol. Oleh karena itu auditor perlu menyesuaikan pendekatan auditnya dengan keadaan yang melingkupi penugasan audit usaha kecil.
4. Standar audit yang ada menyatakan bahwa untuk mendapatkan opini unqualified, perusahaan harus mempunyai internal kontrol yang kuat. Sebagai konsekuensinya, karena usaha kecil sesuai dengan karakteristiknya mempunyai internal kontrol yang lemah, maka usaha kecil susah mendapatkan opini unqualified.

REFERENSI:

- Arens and Loebbecke, 1997. *Auditing : An Integrated Approach*. 7th Ed. Prentice -Hall, Inc. p 301
- Bhaskar, Krish N and Bernard C. William. 1986. Audit and control Issues for The Small Computerized Business". in Wahyudi dan Lucianda "Does Small Business Need A Different Auditing Standard?" Media Akuntansi No.35/Juni 1999. pp 5-8
- Bryan, E.L. and Rouse, R.W. 1984. *Problems of the Business Audit*. The CPA Journal. September, 1984. pp 11-16.
- Carsberg, B.V., et. al. "Small Company Financial Reporting Reseach Studies in Accounting". In Wahyudi dan Lucianda "Does Small Business Need A Different Auditing Standard?". Media Akuntansi No. 35/Juni 1999. pp 5-8
- CICA, 1975. *Internal Control in The Small Business - Study Group on Audit Techniques*. Toronto.
- . 1988. *Audit of a Small Business - an audit Technique Study*. Toronto
- Hennesy, P. 1984a. *Whats So Different About Small Business Audits?*. The Caractered Accountant in Australia. Volume 55/5. November 1984. pp 47-50
- . 1984b. *Whats So Different About Small Business Audits?*. The Chartered Accountant in Australia. December 1984. pp 26-28
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Cetakan ke-1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Jones, M.E. *Auditing: A Subject With Ever Widening Horizons*. "Current Issue in Auditing".
- Keasy, K, et al. 1988. *The Small Company Audit Qualification : A Preliminary Investigation*. Accaounting and Business Research. Volume 18/72. pp 323-333
- Maltzman, Michael A. 1985. *Accounting and Auditing: Audits of Small Business - a New Auditing Procedure Study*. The CPA Journal. December 1985. pp 81
- Nast, Wayne, 1986. *Auditing - One Firm's Approach to Audit of Small Business: Some Problems and Solutions*. The CPA Journal. March 1986. pp 70-71
- Page, Michael J. 1984. *Corporate Financial Reporting and The Small Independent Company*. Accounting and Business Research. Volume 14/55.
- . 1985. *The Auditor and The Smaller Company*. Current Issue in Auditing.
- Schaps, A.L. et.al. 1984. *Auditing Small Business - A New Look*. The CPA Journal. Oktober 1984. pp 12-16.
- Woolf, Emile. 1986. *Auditing Today*. 3 rd Ed. Printice Hall International (UK). pp 12-13, pp 503-504.